

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN DISHARMONISASI KELUARGA (Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Muna Barat Tahun 2017)

Oleh: Nasaruddin dan Bahtiar

Abstrak

Disharmonisasi keluarga pasca proses pemilihan kepala daerah dan faktor-faktor yang menyebabkan disharmonisasi keluarga pasca proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Muna Barat 15 Februari 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan jumlah informan penelitian sebanyak 17 keluarga. Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi (pengamatan dan wawancara). Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dampak atau akibat yang ditimbulkan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Muna Barat tahun 2017 terhadap masyarakat di Kecamatan Barangka ternyata muncul disharmonisasi keluarga dalam hal ini tidak ada kerjasama antara anggota keluarga, tidak adanya komunikasi atau dialog didalam keluarga, kurangnya kasih sayang antara anggota keluarga dan kurangnya saling pengertian sesama anggota keluarga, serta faktor internal yakni wawasan pikiran yang kurang luas, orang tua tidak dewasa dalam berpikir, rumah tangga dengan landasan keimanan yang tidak kuat dan masalah keuangan dalam keluarga serta faktor eksternal yakni keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci: Pilkada, Disharmonisasi Keluarga, Kabupaten Muna Barat.

PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai suatu proses yang telah meniscayakan semangat persamaan dan kebersamaan demi tercapainya kebaikan dalam berpolitik. Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung yakni sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi maupun tidak langsung yaitu masyarakat terlibat dalam peristiwa politik tertentu, misalnya dalam hal memberikan suara pada pemilihan umum.

Kebijakan penyelenggaraan perpolitikan di Indonesia setidaknya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati sebuah demokrasi pada tingkat lokal yang disebut Pilkada. Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem *elite vote* ke *popular vote*. Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak hanya merupakan format baru dalam kancah politik nasional, melainkan merupakan arus politik demokrasi pada arus lokal. Secara khusus perubahan yang terjadi dalam sistem pemilu kepala daerah, yakni dari sistem pengangkatan langsung oleh pejabat pusat, kemudian menjadi sistem pemilihan perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang senantiasa

mengandung kultur *vested inferest* (kepentingan pribadi) di kalangan elite, dan akhirnya menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, pemilu kepala daerah secara langsung merupakan indikator pengambilan hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis (Upe, 2008).

Pilkada dapat memberi ruang bagi tokoh-tokoh masyarakat lokal untuk mengaktualkan setiap gagasan ataupun kepentingan politik untuk kebaikan masyarakatnya. Karena tokoh masyarakat mempunyai kedekatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai gagasan-gagasan demi kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan mampu menyambut kebijakan desentralisasi tersebut. Keberadaan tokoh masyarakat seperti yang ada di Kabupaten Muna Barat, cenderung memilih hanya karena masih adanya ikatan kekeluargaan atau kekerabatan, persahabatan, dan sebagainya.

Dinamika pelaku politik Pilkadabara Kabupaten Muna Barat, dimana saling mempengaruhi antara kelompok-kelompok politik untuk mendapatkan kepentingan elite demi memperoleh keuntungan, namun dalam lingkungan politik dan system politik keluarga atau kerabat merupakan entitas yang saling melekat dan menyatu. Mereka dituntut saling mendukung dan menopang guna mempertahankan struktur dan menjaga tradisi politik kekeluargaan yang dianut bersama tetapi yang terjadi di Pilkadabara di Muna Barat hubungan keluarga atau kerabat menjadi disharmonis karena masing-masing dari mereka hanya mementingkan kepentingan diri masing-masing dan hanya untuk memperoleh keuntungan tersendiri dari hasil pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah.

Keluarga disharmonis adalah kondisi retaknya struktur peran sosial dalam suatu unit keluarga yang disebabkan satu atau beberapa anggota keluarga gagal melainkan kewajiban mereka sebagaimana mestinya (Hendra, 2008). Keluarga disharmonis adalah keluarga yang telah kehilangan esensi dari arti keluarga itu sendiri, karena keluarga disharmonis tidak bisa menjalankan fungsinya.

Disharmonisasi adalah keadaan yang biasanya mencerminkan suatu kondisi dalam situasi yang terjadi dalam sebuah kelompok. Disharmonisasi selalu berkaitan dengan keadaan sebuah rumah tangga atau keluarga.” (Gunarsa, 2004). Disharmonisasi adalah suatu bentuk tidak terjadinya keselarasan secara keseluruhan yang dianggap mempunyai nilai negatif dengan beberapa aspek penilaian. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa disharmonisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang terlihat tidak bahagia dalam suatu kumpulan manusia dan biasanya itu terdapat dalam suatu keluarga.

Dalam lingkungan politik dan sistem politik, keluarga atau kerabat merupakan entitas yang saling melekat dan menyatu. Mereka dituntut saling mendukung dan menopang guna mempertahankan struktur dan menjaga tradisi politik kekerabatan yang dianut bersama. Tradisi politik ini diperlukan guna memelihara keteraturan sosial dan mengelola hubungan di lingkungan komunitas politik bersangkutan. Tradisi politik keluarga atau kekerabatan dijadikan mekanisme alamiah yang efektif

guna mengontrol sumber daya politik agar tidak jatuh kepihak yang salah.

Di sisi untuk menjaga kepentingan strategi, mereka tidak mungkin menyerahkan kepada orang lain, kecuali kepada kerabat atau keluarga sendiri. Dengan kata lain, elite politik lebih menaruh kepercayaan kepada orang yang terikat hubungan darah dan memiliki hubungan budaya serta sosial. Kepercayaan berkaitan dengan kesediaan untuk menyerahkan mandat atau kewenangan kepada pihak yang layak dipercaya atas pertimbangan keamanan. Loyalitas merujuk pada kesetiaan dalam memberi dukungan penuh kepada pihak yang memberi mandat dan kewenangan itu.

Pilkada Muna Barat 15 Februari 2017 telah membawa dampak negatif terhadap masyarakat Muna Barat sendiri, karena telah terjadi konflik masing-masing pendukung kandidat, konflik tersebut berawal dari penetapan calon kandidat, menyangkut tentang persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, proses kampanye, serta proses pemilihan, dimana pendukung atau masyarakat Muna Barat tidak setuju dengan terpilihnya wakil dari salah satu pasangan calon kandidat yang bukan merupakan putra daerah Muna Barat, serta pada saat proses demokrasi berlangsung sejumlah kasus kriminal mulai bermunculan mulai dari perkelahian antar kelompok, pemukulan hingga penikaman, akibat dari konflik tersebut adalah disharmonisasi.

Pelaksanaan Pilkada yang seharusnya menjadi momentum untuk terciptanya sebuah system pemerintahan yang ideal untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur tetapi justru menjadi pemicu terjadinya kedisharmonisan pada keluarga. Kisruh seperti ini tentu akan mempengaruhi pandangan keluarga terhadap pilkada tersebut serta berpengaruh terhadap para peluncur setiap figurnya dalam usahanya mencari massa, utamanya hubungannya dengan interaksi sosial dalam keluarga. Atas dasar ini maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang Pilkada dan disharmonisasi keluarga di Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat. Sebagai pedoman dan pembahasan selanjutnya serta untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana disharmonisasi keluarga pasca proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Muna Barat 15 Februari 2017? Faktor-faktor apa yang menyebabkan disharmonisasi keluarga pasca proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Muna Barat 15 Februari 2017?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu paradigma kualitatif meyakini bahwa didalam masyarakat terdapat keraturan. Keteraturan itu terbentuk secara natural, karena itu tugas peneliti adalah menemukan keteraturan itu, bukan menciptakan atau membuat sendiri batasan-batasannya berdasarkan teori yang ada. Atas dasar itu, pada hakikatnya penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari kancan, bukan untuk menguji teori atau hipotesis. Karenanya, secara epistemologis, paradigma kualitatif tetap mengakui fakta empiris sebagai sumber pengetahuan tetapi tidak menggunakan teori yang ada sebagai bahan

dasar untuk melakukan verifikasi.

Penelitian kualitatif mengembangkan perspektif yang akan digunakan untuk memahami dan menggambarkan realitas. Karena itu, peneliti kualitatif berpendirian ekspansionis, tidak reduksionis. Ia tidak menggunakan proposisi yang berangkat dari teori, melainkan menggunakan pengetahuan umum yang sudah diketahui serta tidak mungkin dinyatakan dalam bentuk proposisi dan hipotesis. Karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak terdapat hipotesis tentatif yang hendak diuji berdasarkan data lapangan. (Upe, 2016).

Informan dalam penelitian ini berjumlah 17 keluarga yang mengalami disharmonisasi yang berasal dari Desa Barangka dan Desa Bungkolo atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah mengali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informasi narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Barangka.

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan mengali informan terkait topik peneliti yang diperlukan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan mengenai dampak Pemilukada yang digelar tahun 2017 terhadap disharmonisasi keluarga di Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, yaitu sebagai Berikut:

1. Bentuk Disharmonisasi Keluarga Pasca Pilkada Di Kabupaten Muna Barat.
 - a. Tidak adanya kerjasama antara anggota keluarga yaitu kerjasama yang tidak baik antara anggota keluarga sangat dihindari dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat tidak toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat meskipun sebelumnya mereka menjalin kerja sama yang baik antara sesama anggota keluarga sebagai mana disharmonisasi yang terjadi dalam keluarga yang ditimbulkan akibat pemilukada di Kecamatan Barangka salah satunya adalah tidak adanya kerjasama antara anggota keluarga dalam usaha pemenangan

kandidat mereka.

- b. Tidak adanya komunikasi atau dialog dalam keluarga yaitu komunikasi adalah cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan tidak adanya memanfaatkan waktu secara efektif dan efisiensi untuk berkomunikasi, maka tidak dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka akibat dari kurangnya komunikasi dalam keluarga sampai-sampai keluarga saling menjelek-jelekan atau saling bersaing dalam berperilaku atau juga diantara mereka tidak saling bertegur sapa meskipun antara mereka ada hubungan keluarga.
 - c. Kurangnya kasih sayang antara keluarga yaitu kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Tetapi bila disuatu keluarga tidak terjalin kasih sayang, maka tidak akan terjalin hubungan emosional yang harmonis antara satu dan lainnya. Hal ini terlihat pada keluarga yang ada di Kecamatan Barangka di mana mereka tidak memperhatikan kasih sayang antara keluarga tetapi hanya mencari cara dan usaha untuk memenangkan kandidat dukungannya, meskipun kasih sayang keluarga diabaikan.
 - d. Kurangnya saling pengertian sesama anggota keluarga yaitu kurangnya kasih sayang pada umumnya para remaja mengharapkan pengertian dari orang tuanya. Dengan tidak adanya pengertian dari keluarga maka dapat menimbulkan pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Barangka karena terlalu fanatik terhadap pasangan calon kandidat maka hubungan sesama anggota keluarga dulunya harmonis tetapi dengan adanya Pilkada menjadi disharmonisasi.
2. Faktor-faktor Penyebab Disharmonisasi Keluarga Pasca Pilkada Di Kabupaten Muna Barat
- a. Faktor Internal

Wawasan pikiran yang kurang luas yaitu dimana pemilih dengan pemilih terkait politik mereka menunjukkan bahwa diantara mereka terjadi yang namanya persaingan akibat perbedaan pilihan. Dikatan persaingan karena diantara mereka yang berbeda pilihan masing-masing bersaing mengagungkan kandidat pilihannya dengan cara mereka masing-masing, justru ada yang saling menjelek-jelekan.

Orang tua tidak dewasa dalam berpikir yaitu dampak yang ditimbulkan akibat pemilu pada terhadap orang tua tidak dewasa dalam berpikir dalam keluarga di Kecamatan Barangka salah satunya adalah orang tua hanya mementingkan kepentingan sendiri tanpa memikirkan keluarganya, karena hanya semata-mata untuk memenangkan pilihannya.

Rumah tangga dengan landasan keimanan yang tidak kuat yaitu dalam sebuah rumah tangga terkadang keluarga memiliki landasan keimanan yang kuat tetapi fenomena yang terjadi di Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna

Barat keluarga terlihat memiliki landasan keimanan yang tidak kuat, semua ini karena terlalu fanatik terhadap kandidat dukungannya.

Masalah keuangan dalam keluarga yaitu dalam sebuah keluarga tidak jarang masalah keuangan menjadi permasalahan yang paling menonjol karena melihat tanggungan yang begitu besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan momen pilkada, maka dalam keluarga mencari peluang untuk memperluas jaringan dalam artian tujuan jangka pendek dalam hal ini adalah materi atau uang.

b. Faktor eksternal

Keluarga yaitu merupakan sebagai miniatur dari organisasi sosial meliputi sedikitnya dua generasi dan terbentuk secara khusus melalui ikatan darah. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya, (Loka, 2012). Tetapi tidak jarang keluarga mengalami disharmonisasi yaitu karena kondisi retaknya struktur peran sosial dalam suatu unit keluarga yang disebabkan satu atau beberapa anggota keluarga gagal melakukan kewajiban mereka sebagai mestinya, keadaan tersebut karena dipengaruhi oleh persaingan dimana individu-individu atau kelompok keluarga yang pada waktu tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman, keadaan tersebut terdapat pada keluarga di Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat.

Masyarakat yaitu orang yang mendiami suatu wilayah yang memiliki ikatan kekeluargaan yang baik, mentaati peraturan, adat istiadat masyarakat setempat, dan mengjunjung tinggi persatuan, tetapi dengan adanya momen pilkada timbul konflik sosial yang mengandung rangkaian fenomena pertikaian dan pertentangan antar pribadi melalui konflik kelas sampai pada pertentangan internasional, hal demikian sangat sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Barangka pada saat moment pemilukada, dimana masyarakat pada saat itu gencar-gencarnya bersaing bahkan muncul yang namanya adu mulut, potensi konflik yang diakibatkan oleh pemilukada sangat besar ditambah lagi masyarakat Kecamatan Barangka sebagian besar adalah masyarakat yang fanatik dan konsisten dengan dukungan mereka.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Disharmonisasi Keluarga Pasca Pilkada di Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat
 - a. Tidak adanya komunikasi antara anggota keluarga
 - b. Kurangnya kasih sayang antara keluarga
 - c. Kurangnya saling pengertian sesama anggota keluarga
 - d. Tidak ada kerjasama antara anggota keluarga

2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Disharmonisasi keluarga Pasca Pilkada di Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, meliputi faktor internal dan eksternal:
 - a. Faktor Internal, meliputi:
 - 1) Wawasan pikiran yang kurang luas
 - 2) Orang tua tidak dewasa dalam berpikir
 - 3) Rumah tangga dengan landasan keimanan yang tidak kuat
 - 4) Masalah keuangan dalam keluarga
 - b. Faktor eksternal, meliputi:
 - 1) Keluarga yaitu, sebagai miniatur dari organisasi sosial meliputi sedikitnya dua generasi dan terbentuk secara khusus melalui ikatan darah, tetapi tidak jarang keluarga mengalami disharmonisasi yaitu karena kondisi retaknya struktur peran sosial dalam suatu unit keluarga yang disebabkan satu atau beberapa anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban mereka sebagai mestinya
 - 2) Masyarakat yaitu, orang yang mendiami suatu wilayah yang memiliki ikatan kekeluargaan yang baik, mentaati peraturan, adat istiadat masyarakat setempat, dan menjunjung tinggi persatuan , tetapi dengan adanya momen pilkada timbul konflik sosial yang mengandung rangkaian fenomena pertikaian dan pertentangan antar pribadi melalui konflik kelas.

Saran

1. Dalam upaya pencapaian tujuan sebuah pelaksanaan pesta demokrasi di daerah, dalam hal ini adalah Pemilu, diperlukan betul-betul persiapan dari semua elemen-elemen yang bertanggung jawab atas sukses tidaknya proses pemilu tersebut, karena hal inilah yang menentukan maju mundurnya sebuah daerah.
2. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari Pemilu maka dibutuhkan sebuah langkah-langkah utamanya bagi para penyelenggara serta penanggung jawab jalannya Pemilu ini, untuk menciptakan proses pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia,serta jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunarsa. 2004. *Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Hendra. 2008. *Keluarga Disharmonis Pasti Bisa Diatasi*. Banjarmasin: Pustaka Cahaya Bangsa.
- Soekanto, Soerjono, 1981. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Loka, G. 2012. Pengaruh Disharmonisasi Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba. *Skrpsi*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Upe, Ambo. 2008. *Sosiologi Politik Kontemporer: Kajian Tentang Rasionalitas Perilaku Politik Pemilih di era Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Upe, Ambo. 2016. *Metode Penelitian Sosial: Filosofi dan Desain Praktis*. Kendari: Literacy Institute.